

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Teori Stakeholders

Teori *stakeholders* merupakan salah satu teori yang mendasari perusahaan melakukan CSR. Teori ini menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholder*. *Stakeholders* merupakan pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Organisasi memiliki banyak *stakeholders* seperti karyawan, masyarakat, negara, *supplier*, pasar modal, pesaing, badan industri, pemerintah asing dan lain-lain. *Stakeholders* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber ekonomi yang digunakan perusahaan (Luthan et al., 2018).

2.1.2 Legitimacy theory

Teori legitimasi berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar mereka pada saat menjalankan aktivitas operasionalnya. Dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar mereka, perusahaan dapat mengayomi masyarakat dan memperoleh penerimaan dari masyarakat dan para investor. Hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan pada citra dan nama baik perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. karena itu, suatu perusahaan dapat

menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan sosial masyarakat melalui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Yusri, 2020).

Teori legitimasi adalah salah satu teori utama yang digunakan dalam penelitian pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Teori legitimasi didasarkan pada gagasan bahwa untuk memastikan sebuah organisasi terus beroperasi dengan sukses, organisasi harus berperilaku dengan cara yang koheren dengan apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima secara sosial oleh masyarakat (Mahmud, 2021).

Perusahaan harus menyadari bahwa keberlangsungan hidup perusahaan juga bergantung pada hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. Mekanisme *Corporate Social Responsibility* atau CSR adalah mekanisme yang dalam praktiknya bertanggung jawab terhadap masyarakat secara sosial. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kontak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice* dan bagaimana perusahaan menanggapi kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Mauliddiyah, 2021).

2.1.3 Kinerja Keuangan

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam jangka panjang. Skala pengukuran variabel ini menggunakan skala rasio. Variabel ini menggunakan rumus *return on asset* (ROA) dengan membagi laba bersih setelah pajak dan total aset yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2020).

Menurut Arifin & Marlius (2018) Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-

alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Mali & Amin (2021) *Corporate social responsibility* adalah gagasan yang membuat perusahaan tidak hanya bertanggungjawab dalam hal keuangan saja, tetapi juga terhadap masalah sosial dan lingkungan sekitar perusahaan agar perusahaan dapat tumbuh secara keberlanjutan.

Menurut Husna (2019) CSR tentunya memberikan dampak positif bagi perusahaan. Dengan dilakukannya CSR maka reputasi perusahaan akan meningkat sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini akan membuat semakin banyak masyarakat yang membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula laba (*profit*) yang didapatkan. Semakin tinggi *profit* perusahaan maka akan menarik banyak investor karena tentunya investor akan melihat profit perusahaan untuk dijadikan salah satu dasar pengambilan keputusan investasi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Standar yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan CSR antara lain dengan menggunakan pedoman yang dirumuskan dalam GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI berperan sebagai sebuah organisasi yang mendukung penerapan pelaporan keberlanjutan dengan membuat sebuah organisasi yang mendukung penerapan pelaporan keberlanjutan dengan membuat sebuah

standarisasi atau pedoman pelaporan. *Global Reporting Initiative* (GRI) membagi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tiga indikator yaitu indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator lingkungan (Putri et al., 2023).

Terdapat indikator yang digunakan dalam pengungkapan CSR menurut GRI versi G4 berjumlah 91 item yang terdiri dari CSR Ekonomi 9 item, CSR Lingkungan 34 item, dan CSR Sosial 48 item. Pengukuran CSR adalah dengan menilai setiap item yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan maupun laporan keberlanjutan. Dinilai 1 jika diungkapkan dan dinilai 0 apabila tidak diungkapkan (Putri et al., 2023).

Tabel 2. 1
91 indikator GRI

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan <i>financial</i> yang diterima dari
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume

	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
-Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam <i>iucn red list</i> dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan

	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-Asesmen Pemasok atas Lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN KERJA		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, <i>gender</i> , dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan

		sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut <i>gender</i>
-Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
-kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan <i>gender</i>
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut <i>gender</i> dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima <i>review</i> kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut <i>gender</i> dan kategori karyawan
-Keberagaman dan Kesenjangan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut <i>gender</i> , kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
-Kesenjangan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil

	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
-Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
-Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-Praktik Pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
-Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan <i>review</i> atau asesmen dampak hak asasi manusia
-Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang

Manusia		signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
-Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti- <i>trust</i> , serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi <i>non-moneter</i> atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGU NGJAWAB ATAS PRODUK		
-Kesehatan Keselamatan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan

Pelanggan		keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait

2.1.5 Koneksi Politik

Menurut Sari (2019) Koneksi politik perusahaan adalah kondisi ketika perusahaan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah atau politikus. Koneksi politik ini dapat terjadi ketika ada anggota top manajemen atau pemegang saham besar perusahaan yang memiliki hubungan dengan politikus atau pejabat tinggi.

Peneliti menetapkan beberapa kriteria untuk memastikan ada atau tidaknya koneksi politik dalam suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan memenuhi

minimal satu kriteria itu artinya, perusahaan tersebut memiliki koneksi politik. Penelitian ini memakai variabel dummy untuk mengukur koneksi politik yaitu, nilai 1 bagi perusahaan yang terbukti memiliki koneksi politik, dan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik (Sulistiyowati et al., 2020).

Indikator yang digunakan dalam menentukan koneksi politik dalam suatu perusahaan yaitu anggota dewan komisaris yang terkoneksi politik seperti kepala negara, pejabat negara, menteri atau anggota parlemen serta anggota TNI atau Polri baik yang sedang menjabat atau pun pensiunan karena memiliki hubungan dekat dengan tokoh politik tinggi (Rahmawati et al., 2022).

Keberadaan sering kali memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti kemudahan mendapatkan pembiayaan, keringanan pajak serta akses untuk memperoleh kontrak pemerintah dan proyek strategis (Rahmawati et al., 2022).

2.1.6 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah perusahaan adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan instansi pemerintah. Pemerintah yang memiliki porsi kepemilikan maka memiliki peran yang besar dalam kegiatan operasional dari perusahaan milik negara dan bertanggung jawab dalam mengelola serta mengatur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan pemerintah mencakup kepemilikan saham oleh badan pemerintah dan BUMN (Angela & Ningsih, 2019).

Kepemilikan pemerintah dihitung melalui kepemilikan saham oleh institusi pemerintah terhadap saham yang beredar (Susetyo et al., 2020).

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Total Saham Milik Pemerintah}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.2 Hasil Penelitian Relevan

Berkaitan dengan topik kajian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian yaitu:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

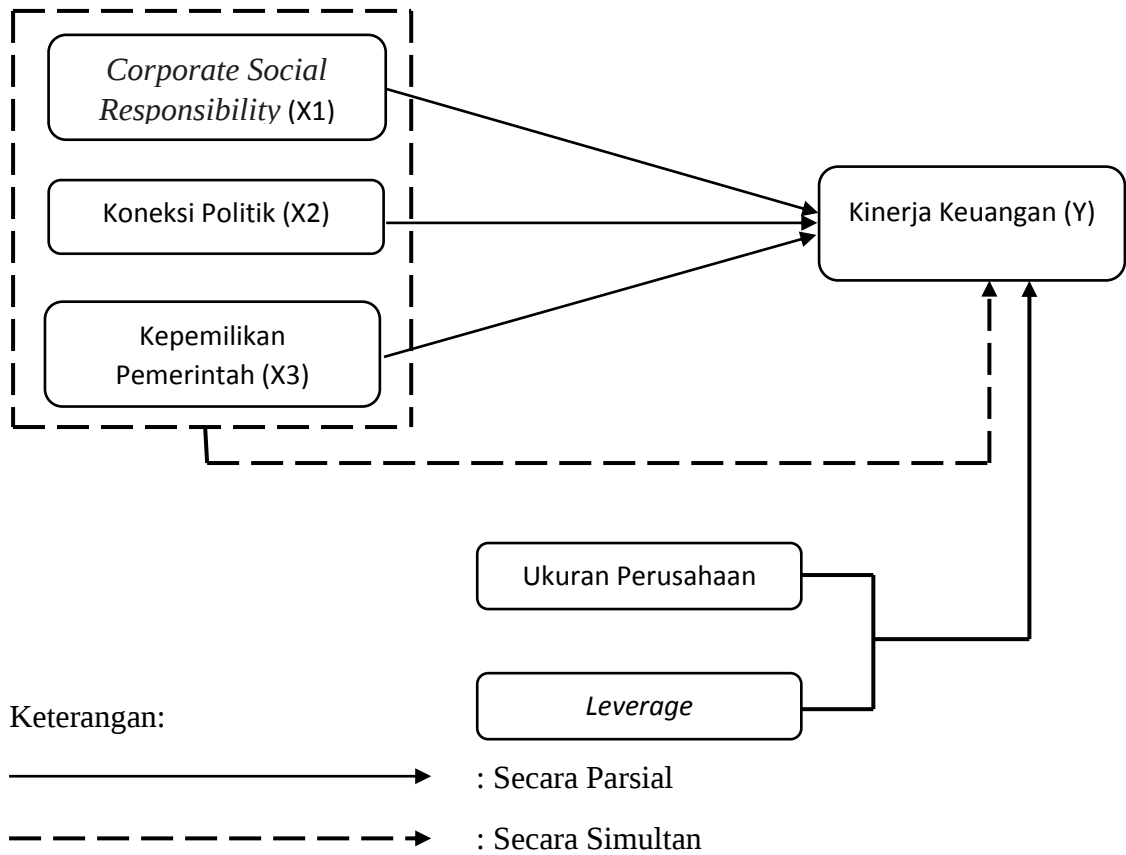
No	Nama Penulis/Tahun/judul	Metode	Hasil
1.	(Ningsih, 2024) <i>How Audit Committee Address The Effects Of Political Connections And Government Ownership In Banking Sectors</i>	1. Metode Kuantitatif 2. Populasi: perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021. 3. Teknik pengumpulan sampel : <i>Purposive Sampling</i>	1. Koneksi politik yang dimoderasi oleh komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021. 2. Kepemilikan pemerintah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2.	(Luthan et al., 2018) Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan	1. Metode Kuantitatif 2. Populasi: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 3. Teknik pengumpulan sampel : <i>Purposive Sampling</i>	1. Pengungkapan CSR berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.
3.	(Sabrina & Muharam, 2015) Analisis Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan	1. Metode Kuantitatif 2. Populasi: perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011.	1. Kepemilikan pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

No	Nama Penulis/Tahun/judul	Metode	Hasil
	Asing, Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan Bank.	3. Teknik pengumpulan sampel : <i>Purposive Sampling</i>	
4.	(Sulistyowati et al., 2020) Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Keuangan dan Profitabilitas	1. Metode Kuantitatif 2. Populasi: seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. 3. Teknik pengumpulan sampel : <i>Purposive Sampling</i>	1. Koneksi politik memberikan pengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Hal itu berarti bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mempunyai kinerja lingkungan yang baik.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Koneksi politik dan kepemilikan pemerintah terhadap kinerja keuangan pada perusahaan LQ45 tahun 2019-2023.

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



2.4 Definisi Operasional

Tabel 2. 3
Definisi Operasional

Variabel	Pengertian	Pengukuran	Skala
Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang	ROA=Laba Bersih / Total Aset	

Variabel	Pengertian	Pengukuran	Skala
	mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.		
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (X1)	<i>Corporate social responsibility</i> adalah gagasan yang membuat perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan saja, tetapi juga terhadap masalah sosial dan lingkungan sekitar perusahaan agar perusahaan dapat tumbuh secara keberlanjutan.	1. Indikator Ekonomi $CSRI = \frac{\sum Xe}{n}$ 2. Indikator Lingkungan $CSRI = \frac{\sum Xl}{n}$ 3. Indikator Sosial $CSRI = \frac{\sum Xs}{n}$ $CSRI = Corporate Social Responsibility$ Index perusahaan $\sum X_{e,l,s}$ = jumlah setiap indikator item pengungkapan CSR yang dipenuhi oleh perusahaan n = jumlah seluruh item pengungkapan CSR	Rasio
Koneksi Politik (X2)	Koneksi politik perusahaan adalah kondisi ketika perusahaan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah atau politikus. Koneksi politik ini dapat terjadi ketika ada anggota top manajemen atau pemegang saham besar perusahaan yang	POLBO = Jumlah anggota dewan yang memiliki hubungan politik / Jumlah total anggota dewan Jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki hubungan politik seperti pejabat negara, menteri, anggota parlemen atau partai, anggota TNI atau POLRI baik yang masih menjabat atau	Rasio

Variabel	Pengertian	Pengukuran	Skala
	memiliki hubungan dengan politikus atau pejabat tinggi.	pensiunan Jumlah total dewan komisaris dalam suatu perusahaan	
Kepemilikan Pemerintah (X3)	Kepemilikan pemerintah perusahaan adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan instansi pemerintah. Kepemilikan pemerintah mencakup kepemilikan saham oleh badan pemerintah dan BUMN.	$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Total Saham Milik Pemerintah}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$	Rasio
Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan adalah skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan total aset, total penjualan, jumlah karyawan, dan lain-lain.	$UP = \ln (\text{Total Aset}_{i,t})$	rasio
<i>Leverage</i>	<i>Leverage</i> adalah penggunaan utang atau pinjaman untuk mendanai kegiatan usaha atau investasi.	$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total hutang}_{i,t}}{\text{Total aset}_{i,t}}$	rasio

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan.

2.5.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan

Corporate social responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan para investor terhadap perusahaan. Perusahaan yakin akan menghasilkan laba yang maksimal dengan memasukkan CSR sebagai strategi bisnisnya (Parengkuan et al., 2017).

Hal ini sesuai dengan teori legitimasi yaitu dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar, perusahaan dapat mengayomi masyarakat dan memperoleh penerimaan dari masyarakat dan para investor. Hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan pada citra dan nama baik perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Yusri, 2020).

Dengan adanya CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata stakeholders, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta CSR dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan stakeholders, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat,

sehingga perusahaan dapat meningkatkan dukungan, loyalitas dan akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.5.2 Pengaruh Koneksi politik Terhadap Kinerja Keuangan

Keunggulan yang didapatkan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik yaitu perusahaan yang akan mudah dalam mendapatkan proyek pemerintah karena adanya politisi yang ada didalam susunan direksi perusahaan, selain itu kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan hutang yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik akan membantu perusahaan yang mengalami tekanan dalam keuangannya untuk bisa bertahan dan bisa terus bersaing dalam industrinya (Sari, 2019).

Tujuan perusahaan yang menginginkan adanya koneksi politik untuk mendapatkan kemudahan pada setiap aktifitas perusahaan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatnya minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut (Ligita & Muazaroh, 2020).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik yang kuat cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik, dikarenakan dengan adanya koneksi politik maka akan memudahkan perusahaan dalam masalah politik mengurangi resiko yang terkait kebijakan pemerintah atau regulasi sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan stabil.

H2: Koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.5.3 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan pemerintah merupakan mayoritas saham yang dimiliki oleh pemerintah yang biasanya berada pada perusahaan BUMN dan sebagian besar modal perusahaan didapatkan dari dana pemerintahan (Susetyo et al., 2020)

Penelitian Wiranata (2013) dalam Angela & Ningsih (2019) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap ROA karena pemerintah dianggap belum mampu mengawasi kegiatan operasional perusahaan dengan baik sehingga memperlambat kinerja dari perusahaan. Kepemilikan pemerintah yang besar membuat tingkat korupsi semakin tinggi sehingga profitabilitas juga menurun.

Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dapat memiliki akses ke pendanaan yang lebih besar dan lebih stabil, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dan berkembang. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar dari stakeholders, karena pemerintah dianggap sebagai entitas yang stabil dan dapat diandalkan serta Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan yang dimilikinya, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

H3: Kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2.5.4 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Koneksi politik dan Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan.

Salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan adalah dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), koneksi

politik dan kepemilikan pemerintah. Dengan perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik, adanya koneksi politik untuk memudahkan perusahaan dalam mengatasi masalah politik dan hukum dan adanya kepemilikan pemerintah untuk mempermudah dalam memperoleh akses sumberdaya, infrastuktur, dan teknologi dapat memenuhi kinerja keuangan yang baik dan diharapkan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan dugaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), koneksi politik dan kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

H4: Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), koneksi politik dan kepemilikan pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan.